



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
JALAN KAPTEN A. RIVAI NO. 259 PALEMBANG
TELEPON. 0711 – 314 129

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tujuan
2. Sasaran
3. Belanja APBD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah
5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahaan (Lokasi)

B. Latar Belakang Penyusunan Laporan.

1. Maksud
2. Tujuan

BAB II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD TRIWULAN I TAHUN 2026

- A. Realisasi Belanja APBD
- B. Realisasi Belanja OPD
- C. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

BAB III KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah. DPMD mengurus pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan di tingkat desa. Dinas ini menjadi penghubung penting antara pemerintah daerah dan desa. Pemberdayaan Masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat dan penataan desa agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Implementasi pemberdayaan itu sendiri sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Pada masa lalu program pemberdayaan masyarakat dibuat di Tingkat Pusat (Top down) yang dilaksanakan oleh instansi provinsi dan kabupaten. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tidak diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Tahun 2016 terjadi perubahan Nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi untuk susunan Dinas Provinsi ada perubahan sebelumnya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Type A. Tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Kedudukan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Penyusunan, Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan dinas;
- c. Pengkoordinasian Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik negara/daerah;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas di daerah;
- f. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan umum, fasilitas serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari provinsi sampai ke Kabupaten/Kota;
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur dilingkungan dinas;

- k. Perumusan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar mudah dilaksanakan supaya dapat cepat dipertanggungjawabkan;
- l. Pelaporan pelaksanaan sasaran/program dan kegiatan yang ada agar dapat disampaikan kepada atasan/pimpinan supaya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pemberdayaan masyarakat dan Desa merupakan suatu proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal menuju keswadayaan dan kemandirian. Proses pemberdayaan bertumpu pada upaya penyadaran (concientization) peningkatan kapasitas (capacity building) self organization , akses kepada sumber daya serta pengembangan kemampuan advokasi yang diharapkan secara bertahap mampu melakukan perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat.

1. Tujuan

Tujuan nya sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu “Meningkatnya Fasilitas tata kelola desa”. Tujuan tersebut selaras dengan Misi VI RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai.

2. Sasaran

Sasaran nya yaitu meningkatnya jumlah desa mandiri dan meningkatnya jumlah desa maju

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumsel		
TUJUAN	SASARAN	ARAH TUJUAN
1. Meningkatkan Fasilitas Tata Kelola Desa	1. Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	1. Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik
	2. Meningkatnya Jumlah Desa Maju	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa
		4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Desa
		5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa

3.
Belanja APBD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
- PAGU Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dari APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 21.339.408.874,- dengan Rincian sebagai berikut :
- Belanja Operasional
 - Belanja Pegawai
Rp
7.927.620.532,-
 - Belanja Barang dan Jasa
Rp
12.389.953.569,-

Belanja Modal
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp
21.834.773
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp
1.000.000.000,-

PAGU Anggaran sebesar Rp 21.339.408.874,- terdiri atas 5 Program, 11 Kegiatan dan 42 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- a.
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA, SKPD

3)
Koordinasi dan Penyusunan DPA, SKPD

4)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

b.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1)
Penyediaan gaji dan tunjang ASN

2)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD

3)
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- 4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Administrasi Umum dan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 3) Penyediaan Bahan logistik kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - 6) Fasilitasi kunjungan tamu
 - 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah desa
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya / Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 4) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Penataan Desa
 - a. Penatausahaan Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat
 - 1) Fasilitasi kabupaten/kota dan desa dalam rangka penataan desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 1) Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
4. Program Adminitrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa

- 1) Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
 - 2) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - 3) Fasilitasi pengelolaan Aset desa
 - 4) Fasilitasi Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan
 - 6) Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
 - 7) Pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis
 - 8) Pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUM desa kabupaten/kota dan lembaga kerjasama antar desa
 - 9) Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
 - 10) Fasilitasi pengembangan inovasi desa
 - 11) Fasilitasi penetapan kewenangan desa dan desa adat di kabupaten/kota
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota
 - 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dari masyarakat hukum adat
 - 2) Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
 - 3) Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemerintahan teknologi tepat guna
 - 4) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - 5) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas PMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Ket
			2024	2026	
Meningkatnya fasilitas tata kelola desa	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Persentase desa mandiri	19.89%	20.56%	
	Meningkatnya jumlah desa maju	Persentase desa maju	36%	36%	

Beberapa indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahaan (Lokasi)
Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di 17 Kabupaten/kota se – Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Penyusunan Laporan.

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang akurat dan objektif kepada pihak yang membutuhkan, meningkatkan akuntabilitas serta sebagai alat evaluasi terhadap capaian program / kegiatan / sub kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk :

1. Mendorong tranparansi dalam pelakasanaan tugas pokok dan fungsi organisasi kepada pemangku kepentingan
2. Menilai capaian target kinerja yang ditetapkan di awal perencanaan kerja
3. Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan kedepan
4. Menjadi bahan dalam identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi

BAB II

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM /

KEGIATAN APBD TRIWULAN II TAHUN 2026

A. Realisasi Belanja APBD

Tabel 3. Realisasi Belanja APBD Dinas PMD Prov. Sumsel sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

URAIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISSI ANGGARAN	
		KEUANGAN (RP)	(%)
BELANJA OPERASI			
- Belanja Pegawai	Rp 7.927.620.532	Rp 2.837.787.671	35.80 %
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.389.953.569	Rp 2.359.894.599	19,05%
BELANJA MODAL			
- Belanja Modal Peralatan dan mesin	Rp 21.834.773	Rp -	
- Belanja modal gedung dan bangunan	Rp 1.000.000.000	Rp -	
TOTAL BELANJA	Rp 21.339.408.874	Rp 5.197.682.270	

B. Realisasi Belanja OPD

Tabel 4. Realisasi capaian perjanjian kinerja sampai dengan triwulan 1 tahun 2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong
1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persentase	20,56%	8,16%	8,16%	
2	Meningkatnya jumlah Desa maju	Persentase Desa Maju	Persentase	36%	40,42%	40,42%	

C. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

Belum ada penghargaan yang di raih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sepanjang Triwulan II Tahun 2026

BAB III

KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kendala yang dihadapi sepanjang triwulan II tahun anggaran 2026 belum terlalu banyak, kendala yang sangat mempengaruhi adalah adanya rencana efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan belum bisa melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatannya secara optimal karena masih menunggu kejelasan pagu anggaran setelah efisiensi.

Tindak lanjut nya adalah menunggu pelaksanaan efisiensi sehingga pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tidak ragu – ragu lagi dalam menjalankan kegiatan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sepanjang triwulan II tahun Anggaran 2026, semoga laporan ini dapat membantu memantau progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sehingga memudahkan dalam mengevaluasi progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan pencapaian target dan adanya evaluasi secara berkala ini dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Palembang, Juli 2026

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. SUTOKO, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196612141994031004

LAPORAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PER TANGGAL 30 JUNI 2026 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Sumber Pendanaan	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat atau Pendorong
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini							
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	13,339,408,874	100%		3,397,668,841			100%		0.00				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	352,680,054	100%		161,745,350			100%		0.00				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	285,000,000	100%	56.75	161,745,350	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%		56.75	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,000,000	100%			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	100%		0.00	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,000,000	100%			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	100%		0.00	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65,680,054	100%			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	100%		0.00	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,371,857,460	100%		2,869,807,671			100%		0.00				
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,927,620,532	100%	35.80	2,837,787,671	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	100%	55 Orang/Bulan	35.80	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	327,780,000	100%	9.77	32,020,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100%		9.77	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63,016,928	100%	17.51	11,034,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100%		17.51	APBD	Palembang, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	53,440,000	100%			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	100%		0.00	APBD	Palembang, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000	100%	28.33	17,000,000			100%		28.33				
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60,000,000	100%	28.33	17,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	100%		28.33	APBD	Palembang, Luar Provinsi		
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,062,436,643	100%		349,115,820			100%		0.00				
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80,000,000	100%			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100%		0.00	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,000,000	100%			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	100%		0.00	APBD	Palembang		Terlaksana dengan baik

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Sumber Pendanaan	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat atau Pendorong
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini							
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	100%	99.45	149,170,010	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	100%		99.45	APBD	Palembang		Terlaksana dengan baik
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,000,000	100%			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	100%		0.00	APBD	Palembang		Terlaksana dengan baik
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,000,000	100%			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100%		0.00	APBD	Palembang		Terlaksana dengan baik
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120,000,000	100%			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Konsumsi Rapat Kantor dan SKJ)	1 Laporan	100%		0.00	7,060,335,513	2,964,483,802		Terlaksana dengan baik
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	575,436,643	100%	34.75	199,945,810	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sesuai Kebutuhan)	2 Laporan	100%		34.75	3,946,445,711	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,834,773	100%					100%		0.00	149,406,000	#####		
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,834,773	100%			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	100%		0.00	19,894,735,082	34.73747946		Terlaksana dengan baik
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,314,599,944	100%		181,138,000			100%		0.00	11,926,237,565	24.85682333		
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,000,000	100%			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Lembar	100%		0.00	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397,599,944	100%	11.11	44,178,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening/12 bulan	100%		11.11	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900,000,000	100%	15.22	136,960,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 Orang/44OK	100%		15.22	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,156,000,000	100%					100%		0.00		Kantor OPD		
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizninan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,000,000	100%			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	100%		0.00	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316,000,000	100%	26.83	84,787,532	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	100%		26.83	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80,000,000	100%			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	100%		0.00	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
24	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,690,000,000	100%			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	100%		0.00	APBD	Kantor OPD		Terlaksana dengan baik
II	PROGRAM PENATAAN DESA	50,000,000	100%					100%		0.00				
i	Penata Usahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	50,000,000	100%					100%		0.00				
25	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan Desa	50,000,000	100%			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Desa Perbatasan)	1 Dokumen	100%		0.00	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA	531,000,000	100%		219,855,494			100%		0.00				
i	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	531,000,000	100%		219,855,494			100%		0.00				

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Sumber Pendanaan	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat atau Pendorong
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini							
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
26	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	531,000,000	100%	41.40	219,855,494	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	100%		41.40	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,083,200,000	100%		814,057,470			100%		0.00				
i	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,083,200,000	100%		814,057,470			100%		0.00				
27	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	450,000,000	100%	49.70	223,651,635	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				49.70				
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	800,000	100%			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Jumlah Kab/Kota dan Desa Sample yang terfasilitasi penyaluran dana desa	2 Dokumen	100%		0.00	APBD	Muratara dan Prabumulih		Terlaksana dengan baik
29	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1,000,000	100%			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	100%		0.00	APBD	OKU dan Kab/Kota,		Terlaksana dengan baik
30	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1,070,800,000	100%	8.86	94,910,384	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100%		8.86	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
31	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	818,000,000	100%	31.12	254,595,406	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina, Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina (Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa)	250 Orang	100%		31.12	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
32	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1,000,000	100%			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100%		0.00	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		
33	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	800,000	100%			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	2 Dokumen	100%		0.00	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		
34	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	458,200,000	100%	52.58	240,900,045	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	100%		52.58	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
35	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	280,800,000	100%			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	100%		0.00	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi		Terlaksana dengan baik
36	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	800,000	100%			Jumlah Fasilitasi Labsite Desa/Kelurahan	1 Dokumen	100%		0.00		Kab/Kota, Luar Provinsi		
37	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	1,000,000				Jumlah dokumen Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100%						
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4,335,800,000	100%		766,100,465			100%		0.00				
i	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4,335,800,000	100%		766,100,465			100%		0.00				

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Sumber Pendanaan	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat atau Pendorong
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini							
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
38	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	660,000,000	100%	42.56	280,910,825	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (KPM Desa), Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (nominator pemenang lomba PKK, KB Kes dan Lomba LBS)	6 Lembaga	100%		42.56	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi	Penurunan Stunting	Terlaksana dengan baik
39	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	360,000,000	100%			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (pendataan daerah potensi desa wisata unggulan)	4 Dokumen dan 1 laporan	100%		0.00	APBD	Kab/Kota, Luar Provinsi	Penurunan Kemiskinan	Terlaksana dengan baik

